



## PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 6 Januari 2026

Nomor : S/800.1.3/14/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Pemberitahuan Lowongan Seleksi Mutasi Masuk  
ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2026

Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian dan Lembaga  
2. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota  
di -

Tempat

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan akuntabel, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tes Mutasi Masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis akuisisi talenta eksternal Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi masing-masing yang memenuhi persyaratan dan berminat mengikuti seleksi dimaksud.

Adapun ketentuan, persyaratan, daftar lowongan jabatan, tahapan seleksi, serta mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan Tes Mutasi Masuk tercantum secara rinci dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249  
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266  
Laman [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id), Pos-el [ppid@jatengprov.go.id](mailto:ppid@jatengprov.go.id)

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TES SELEKSI MUTASI MASUK KE PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH BERBASIS AKUISISI TALENTA EKSTERNAL  
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi Dan Antarprovinsi;
6. Peraturan Kepala BKN nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

II. ALOKASI FORMASI

Jumlah alokasi kebutuhan formasi mutasi masuk tahun anggaran 2026 sebanyak 140 (Seratus Empat Puluh) formasi yang terdiri dari :

No	JENIS FORMASI	JUMLAH
1	2	3
1.	Tenaga Kesehatan	18
2.	Tenaga Teknis	122
TOTAL		140

**Rincian kebutuhan jabatan dan formasi jabatan, kualifikasi Pendidikan, dan unit organisasi penempatan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada lampiran II surat ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.**

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum
  - a. Pelamar merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif di lingkungan instansi pemerintah (bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Tenaga Non ASN);
  - b. Memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat bulan pendaftaran dibuka, ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan, bagi jabatan yang memiliki keahlian khusus, atas persetujuan PPK/PyB melalui kajian dari OPD tujuan;
  - d. Bersedia melengkapi dokumen persyaratan yang diwajibkan dalam bentuk scan asli/dokumen elektronik (format dokumen terlampir pada lampiran IV s.d XVI);
  - e. Tidak terblokir syarat minimal mutasi 10 (sepuluh) tahun masa kerja sejak diangkat sebagai PNS, pada aplikasi SIASN BKN.
2. Persyaratan Khusus
  - a. Bagi Pelamar dengan **Jabatan Fungsional Kesehatan** wajib memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
  - b. **Bagi Pelamar dengan Jabatan Fungsional Kesehatan** yang melamar pada unit organisasi Rumah Sakit Daerah dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah wajib melampirkan **surat rekomendasi kelayakan kompetensi/keahlian dari Kepala OPD tujuan, yang diurus mandiri oleh pelamar dan teknis penerbitannya diatur masing-masing oleh Kepala OPD tujuan;**
  - c. Bagi Pelamar dengan Jabatan Fungsional melampirkan penetapan angka kredit terakhir;

- d. Bersedia diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional, bagi pejabat pelamar dengan jabatan fungsional;
- e. Tidak mengajukan pindah ke luar pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pindah antar OPD minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak penempatan pertama di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. Bagi PNS dengan jabatan Pelaksana dapat memilih secara bebas pilihan jabatan pelaksana yang tersedia sesuai lowongan jabatan yang tersedia, sepanjang memenuhi syarat kualifikasi Pendidikan;
- g. Bagi PNS dengan Jabatan Fungsional hanya bisa melamar pada Jabatan Fungsional dengan nomenklatur yang sama sesuai lowongan jabatan yang tersedia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Nomenklatur lowongan jabatan yang tidak tercantum pada lampiran II surat ini, **maka tidak dibuka untuk diisi melalui mekanisme mutasi masuk** ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Kebutuhan Lowongan jabatan yang tersedia sebagaimana terlampir pada lampiran II surat ini akan diupdate secara berkala pada setiap periode apabila sudah terisi, periode berikutnya akan dibuka untuk formasi yang tersisa (kosong);
- j. Lowongan Jabatan sebagaimana terlampir pada lampiran II surat ini merupakan hasil usul kebutuhan jabatan prioritas yang diusulkan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi Administrasi (bersifat menggugurkan/tidak memenuhi syarat);
- b. Pelaksanaan CAT Potensi (bersifat menggugurkan/tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya apabila tidak memenuhi syarat), dilaksanakan secara daring (online) melalui *zoom meeting*, di domisili pelamar masing-masing;
- c. Pelaksanaan Wawancara *Talent Growth Interview* dengan OPD Tujuan (yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan CAT Potensi), Peserta wajib menyampaikan paparan singkat dalam bentuk bahan tayang (*PowerPoint*), ketentuan dan struktur paparan terlampir pada lampiran III surat ini;

#### V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui website <https://bkd.jatengprov.go.id>;
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jabatan;
3. Pengumuman dan Pelamaran dapat dilihat pada portal resmi dan media Sosial Resmi BKD Provinsi Jawa Tengah;
4. Seleksi Administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://bkd.jatengprov.go.id> dan tidak ada penyerahan dan/atau pengiriman dokumen secara fisik;
5. Harap mencermati seluruh informasi dan imbauan yang tercantum dalam portal resmi serta pada saat melakukan pengisian pelamar wajib memastikan bahwa data yang dimasukan adalah data yang sebenarnya;

#### VI. PERSYARATAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN WAJIB UNTUK MENGIKUTI SELEKSI DAN SETELAH DINYATAKAN LULUS SELEKSI MUTASI MASUK

Setiap dokumen persyaratan yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, terlihat, terbaca dengan jelas dan utuh atau tidak terpotong dengan cara dipindai (scan) kemudian diunggah melalui laman <https://bkd.jatengprov.go.id> dengan format dan ukuran (maksimal per file 2 Mb, format PDF) yang sesuai dengan ketentuan yang terdiri dari :

NO	PERSYARATAN
1	2
<b>a. BERKAS WAJIB SEBAGAI SYARAT IKUT TES MUTASI</b>	
1a.	Daftar riwayat hidup sesuai dengan format yang ditentukan (Format pada Lampiran IV)

NO	PERSYARATAN
1	2
2a.	Surat pengantar/rekomendasi mengikuti Tes Mutasi dari instansi asal ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) (Format pada Lampiran VI)
3a.	Surat Permohonan dari PNS bersangkutan, dengan mencantumkan nomor whatsapp aktif ,alamat email, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditandatangani dan bermeterai tempel Rp 10.000 sesuai format yang telah ditentukan (Format pada Lampiran VII)
4a.	Surat pernyataan rekam jejak bermeterai Rp 10.000 (Format pada Lampiran VIII)
5a.	Surat Keterangan tidak tersangkut hutang piutang yang dinyatakan secara tertulis oleh Bendahara PNS bertugas (Format Pada Lampiran IX)
6a.	Surat Pernyataan Kesiapan Mengikuti Proses Mutasi dan tidak menuntut jabatan bermeterai Rp 10.000 (Format pada Lampiran X)
7a.	Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Proses Kenaikan Pangkat selama proses mutasi berlangsung diterbitkan Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Yang Menangani Kepegawaian (Format Pada Lampiran XI)
8a.	Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Proses Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional selama proses mutasi berlangsung diterbitkan Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Yang Menangani Kepegawaian <b>(bagi Pelamar dengan Jabatan Fungsional)</b> (Format Pada Lampiran XII)
9a.	Surat Pernyataan tidak mengganggu kinerja organisasi atas proses mutasi PNS, yang ditandatangani oleh Pimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit kerja/OPD asal (Format Pada Lampiran XV)
10a.	<b>Bagi Pelamar dengan Jabatan Fungsional Kesehatan</b> yang melamar pada unit organisasi Rumah Sakit Daerah dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah wajib melampirkan <b>surat rekomendasi kelayakan kompetensi/keahlian dari Kepala OPD tujuan</b> , sebelum mendaftar seleksi mutasi (diurus mandiri oleh pelamar, teknis penerbitan dan format surat diatur oleh masing-masing OPD tujuan)
11a.	Scan asli SK PNS
12a.	Scan asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir
13a.	Scan Asli SK Jabatan Pelaksana Terakhir <b>(bagi pelamar dengan jabatan pelaksana)</b>
14a.	Scan Asli SK jabatan Fungsional Pengangkatan pertama dan terakhir <b>(bagi pelamar dengan jabatan fungsional)</b>
15a.	Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir <b>(bagi pelamar dengan Jabatan Fungsional)</b>
16a.	Scan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir
17a.	Scan asli penilaian prestasi kerja (SKP) bernilai <b>minimal BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir</b>
18a.	Sertifikat Keahlian (STR, Sertifikat Profesi, Sertifikat keahlian lainnya, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi profesi dan kompetensi)
19a.	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari <b>Instansi asal yang menunjukan kebutuhan, kekurangan dan bezetting pegawai</b> , pada jabatan PNS yang bersangkutan, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) (format Sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Kepala BKN nomor 5 tahun 2019)
<b>b. BERKAS WAJIB SETELAH DINYATAKAN LULUS SELURUH TAHAPAN TES MUTASI DAN MENDAPAT LOLOS BUTUH DARI GUBERNUR JAWA TENGAH</b>	
1b.	Surat pernyataan dari Instansi Asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama (Format Pada Lampiran V)

NO	PERSYARATAN
1	2
2b.	Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Instansi Asal (Format pada Lampiran XIII)
3b.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Format Pada lampiran XIV)
4b.	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada rumah sakit pemerintah/rumah sakit swasta terakreditasi pada bulan saat pendaftaran dibuka
5b.	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari unit kerja/OPD Tujuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah <b>yang menunjukkan kebutuhan, kekurangan dan bezetting pegawai</b> , pada jabatan PNS yang bersangkutan, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) (format Sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Kepala BKN nomor 5 tahun 2019)
6b.	Surat Pernyataan kesediaan Usul Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional dari Kepala OPD tujuan <b>(Bagi Pelamar dengan Jabatan Fungsional)</b> (Format pada Lampiran XVI)
7b.	Surat Pernyataan Persetujuan Mutasi (Lolos Butuh) dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal (format Sesuai ketentuan Peraturan Kepala BKN nomor 5 tahun 2019)

## VII. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	2	3
TES MUTASI PERIODE I		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mutasi Masuk Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Periode I	Januari 2026 – April 2026
2.	Pendaftaran Administrasi Tes Mutasi Periode I	
3.	Seleksi Administrasi (Proses Verifikasi Berkas)	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
5.	Tes CAT Potensi (daring/online di tempat masing-masing)	
6.	Pengumuman Hasil CAT Potensi	
7.	Wawancara <i>talent growth interview</i> dengan OPD Tujuan	
8.	Pengolahan Nilai	
9.	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Mutasi Periode I	
TES MUTASI PERIODE II		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mutasi Masuk Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Periode II	Mei 2026 – Agustus 2026
2.	Pendaftaran Administrasi Tes Mutasi Periode II	
3.	Seleksi Administrasi (Proses Verifikasi Berkas)	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
5.	Tes CAT Potensi (daring/online di tempat masing-masing)	
6.	Pengumuman Hasil CAT Potensi	
7.	Wawancara <i>talent growth interview</i> dengan OPD Tujuan	
8.	Pengolahan Nilai	
9.	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Mutasi Periode II	
TES MUTASI PERIODE III		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mutasi Masuk Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Periode III	September – Desember 2026

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	2	3
2.	Pendaftaran Administrasi Tes Mutasi Periode III	
3.	Seleksi Administrasi (Proses Verifikasi Berkas)	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
5.	Tes CAT Potensi (daring/online di tempat masing-masing)	
6.	Pengumuman Hasil CAT Potensi	
7.	Wawancara <i>talent growth interview</i> dengan OPD Tujuan	
8.	Pengolahan Nilai	
9.	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Mutasi Periode III	

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tes mutasi masuk di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setiap perubahan akan diinformasikan secara resmi oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

Seluruh peserta wajib mengikuti setiap tahapan kegiatan yang telah ditetapkan dan mengikuti perkembangan informasi yang diumumkan melalui portal resmi.

#### VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Seluruh Tahapan Pelaksanaan Proses mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gratis, **tidak dipungut biaya apapun serta terbuka untuk seluruh PNS pada Instansi Daerah/Kementerian/Lembaga yang memenuhi persyaratan mutasi sesuai ketentuan yang berlaku;**
- Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas, terpotong, tidak utuh, dan/atau tidak sesuai dengan dokumen pengunggahan yang mengakibatkan pelamar dinyatakan gugur;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri;  
Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pada portal resmi <https://bkd.jatengprov.go.id>, serta sosial media resmi BKD Provinsi Jawa Tengah secara berkala, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipedomani adalah informasi terakhir;
- Informasi lainnya berkaitan dengan Seleksi Mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 disampaikan melalui:
  - Whatsapp : 0877-3292-0999 (pada hari dan jam kerja)
  - Instagram : @bkdprovjateng (pada hari dan jam kerja)
  - Website : <https://bkd.jatengprov.go.id>

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

**RINCIAN KEBUTUHAN, ALOKASI FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN UNIT ORGANISASI PENEMPATAN PEGAWAI PADA SELEKSI  
MUTASI MASUK KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengolah Data dan Informasi	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	D-III Ilmu Komputer/ D-III Pemerintahan/D-III Manajemen/ D-III ManajemenPerusahaan/ D-III Kebendaharaan Negara	1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2	Pengolah Data dan Informasi	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	D-III Ilmu Komputer/ D-III Pemerintahan/D-III Manajemen/ D-III ManajemenPerusahaan/ D-III Kebendaharaan Negara	1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
3	Pengadministrasi Perkantoran	Sub Bagian Program - Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	SLTA/ Sederajat	1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	D/IV dan S1 Manajemen, Ekonomi, Hukum, Akuntansi, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik	2	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
5	Pengelola Layanan Operasional	Sub Bagian Tata Usaha	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	D III Administrasi Negara, Publik, Administrasi Perkantoran, Manajemen, Bidang yang relevan	1	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
6	Penelaah Teknis	Sub Bagian Program	Dinas Perumahan	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Perumahan

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan		Rakyat dan Kawasan Permukiman			Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Pengelola Layanan Operasional	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	D-III Semua Jurusan	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Fasilitator Pemerintahan	Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Arsiparis Terampil	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	D-III Kearsipan / Disiplin Ilmu Lain	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Pustakawan Ahli Pertama	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	D-IV/ S-1 Perpustakaan, Ilmu Perpustakaan	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Asisten Perpustakaan Terampil	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	D-III Ilmu Perpustakaan Perpustakaan,	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	Arsiparis Penyelia	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kelautan dan Perikanan	D-III Manajemen	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Pranata	Sub Bagian Umum dan	Dinas Kelautan dan	D-III Teknik Informatika	1	Dinas Kelautan



NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Komputer Penyelia	Kepegawaian	Perikanan			dan Perikanan
14	Pengelola Produksi Perikanan tangkap Ahli Pertama	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	S-1 Perikanan/S-1 Kelautan	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	S-1 (Administrasi Publik, Agribisnis, Antropologi, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pertanian, Gizi, Gizi Masyarakat, Ilmu Dan Teknologi Pangan, Ilmu Gizi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pangan, Keamanan Pangan, Kebijakan Pangan, Manajemen, Manajemen Agribisnis, Manajemen Dan Bisnis, Manajemen Kebijakan Publik, Manajemen Mutu Pangan, Sains Pangan, Sosial Ekonomi Pertanian, Sosial Ekonomi Peternakan, Sosiologi, Teknik Pangan, Teknik	1	Dinas Ketahanan Pangan

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				Pertanian Dan Biosistem, Teknologi Hasil Perikanan, Teknologi Hasil Pertanian, Teknologi Hasil Peternakan, Teknologi Industri Pangan, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Pangan, Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian, Teknologi Pasca Panen, Teknologi Pertanian)		
16	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan	S-1 (Administrasi Publik, Agribisnis, Antropologi, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pertanian, Gizi, Gizi Masyarakat, Ilmu Dan Teknologi Pangan, Ilmu Gizi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pangan, Keamanan Pangan, Kebijakan Pangan, Manajemen, Manajemen Agribisnis, Manajemen Dan Bisnis, Manajemen Kebijakan Publik, Manajemen Mutu Pangan, Sains Pangan, Sosial Ekonomi Pertanian, Sosial Ekonomi Peternakan, Sosiologi, Teknik	1	Dinas Ketahanan Pangan

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				Pangan, Teknik Pertanian Dan Biosistem, Teknologi Hasil Perikanan, Teknologi Hasil Pertanian, Teknologi Hasil Peternakan, Teknologi Industri Pangan, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Pangan, Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian, Teknologi Pasca Panen, Teknologi Pertanian)		
17	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Ketahanan Pangan
18	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kemasyarakatan				
21	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
22	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	D-III Semua Jurusan	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
23	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sub Bagian Program	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	S-1 Sistem Informasi, S-1 Teknik Informatika, S-1 Ekonomi Manajemen	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
24	Penelaah Teknis Kebijakan	Unit Penilaian Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	DIV/S-1 Semua Jurusan	1	Badan Kepegawaian Daerah
25	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	D-III Hubungan Masyarakat/Illmu Komunikasi	1	Badan Kepegawaian Daerah
26	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Keuangan	Badan Kepegawaian Daerah	D-III/DIV/S-1 Akuntansi	1	Badan Kepegawaian Daerah
27	Penelaah Teknis	Bidang Penegakan	Satuan Polisi	S-1/ D-IV di Bidang Hukum, Pemerintahan,	1	Satuan Polisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan	Hukum Daerah	Pamong Praja	Teknik Informatika, Manajemen, Sosial Politik, Administrasi Negara		Pamong Praja
28	Penata Layanan Operasional	Bidang Pelindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	S-1/ D-IV di Bidang Hukum, Pemerintahan, Teknik Informatika, Manajemen, Sosial Politik, Administrasi Negara	1	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	D-III di bidang kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Satuan Polisi Pamong Praja
30	Dokter Ahli Muda (Spesialis Obstetri dan Ginekologi)	Bidang Pelayanan Medis	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	S-1 dan Profesi Dalam Bidang Ilmu Kedokteran, Kedokteran Spesialis, dan Kedokteran Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dari Pendidikan Tinggi yang Terakreditasi	1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi
31	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	Seksi Penunjang Medis	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	D-IV/Sarjana Terapan/S-1 Analis Kesehatan; Teknologi Laboraturum Medik; Teknologi Laboratorium Medis; Teknologi Laboratorium Kesehatan/Tekno-Logi Laboratoriuam Medik; Farmasi Peminatan Teknologi Laboratorium Kesehatan/Tekno-Logi Laboratorium Medik; Biologi; Kimia; Teknik Kimia; Teknik Pangan; Teknik Lingkungan; Biokimia; Biomedik; Bioteknologi; Mikrobiologi; Biomolekuler	1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi
32	Penelaah Teknis	Sub Bagian	Rumah Sakit Jiwa	Sarjana Satu (S-1)	1	Rumah Sakit Jiwa

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan	Perbendaharaan	Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	Akuntansi/Manajemen/Ekonomika		Daerah Dr. RM. Soedjarwadi
33	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	S-1 Semua Jurusan	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
34	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	D-III/S-1 Akuntansi/ Manajemen / Keuangan	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35	Pranata Komputer Ahli Muda	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	S-1/D-IV Teknik Informatika/ Sistem Informasi / Komputer	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36	Sandiman Ahli Pertama	Bidang Persandian Dan Keamanan Siber	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital	S-1/D-IV Teknik Persandian/manajemen persandian/Teknik informatika/Manajemen informatika/sejenis	1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital
37	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	Bidang Pengelolaan Data Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital	S-1/D-IV Geodesi/Geomatika/Geografi/Planologi/Illmu computer/Kartografi/sejenis	1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital
38	Penelaah Teknis	Sub Bagian Keuangan	Dinas Komunikasi,	S-1/D-IV Akuntansi/Manajemen/	1	Dinas Komunikasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan		Informatika Dan Digital	Keuangan/Ekonomi/Administrasi/sejenis		Informatika Dan Digital
39	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	D-III Kearsipan	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40	Penata Laksana Barang Terampil	Seksi Pengelolaan Aset	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	S-1 Ekonomi/S-1 Manajemen/S-1 Akuntansi/S-1 Ekonomi Pembangunan	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41	Penata Ruang Ahli Muda	Bidang Penataan Ruang	Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	Operator Laboratorium	Seksi Pengujian Mutu	Balai Pengujian dan Peralatan	D3/S1 Teknik Kimia D3/S1 Teknik Sipil	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	Pengelola Layanan Operasional	Seksi Pengujian Mutu	Balai Pengujian dan Peralatan	D3/ S1 Teknik Kimia	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Rencana Program, Monitoring dan Evaluasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	S-1 Akuntansi/S-1 Manajemen/S-1 Ekonomi/S-1 Komputer/S-1 Teknik Informatika	1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
45	Penelaah Teknis	Dinas Penanaman	Dinas Penanaman	S-1 Semua Jurusan, D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Penanaman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Keuangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	D-III Semua Jurusan	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
47	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	D-III Semua Jurusan	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
48	Perawat Ahli Muda	Bidang Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi	S1/D-IV Keperawatan + Profesi Ners	1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
49	Dokter Ahli Madya (Spesialis Patologi Anatomi)	Bidang Pelayanan Medis	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi	Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp-1)	1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
50	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Perbendaharaan	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi	D-III Manajemen/Ekonomi/Akuntansi/Perpajakan	1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
51	Dokter Ahli Muda (Spesialis Anak)	Bidang Pelayanan Medis	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin	Pendidikan Dokter Spesialis Anak (Sp-1)	1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
52	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Seksi Penunjang Medis	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin	D-III Analis Kesehatan	1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
53	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Program	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
54	Penata Laksana Barang Terampil	Sub Bagian Rumah Tangga	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo	D-III Semua Jurusan	1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo
55	Pengolah Data	Seksi Penunjang	Rumah Sakit Jiwa	D-III Manajemen, Administrasi, Teknik	1	Rumah Sakit Jiwa

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	dan Informasi	Medis	Daerah Dr. Amino Gondohutomo	Informatika		Daerah Dr. Amino Gondohutomo
56	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sub Bagian Manajemen Data Dan Sistem Informasi	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo	D-IV/S-1 Bidang Komputer/Sistem Informasi	1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo
57	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan	S-1 Hukum	1	Dinas Perhubungan
58	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Perhubungan
59	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Tata Usaha	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV	D-III Semua Jurusan	1	Dinas Perhubungan
60	Dokter Ahli Muda (Spesialis Patologi Klinik)	Bidang Pelayanan Medis	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp-1)	1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah
61	Dokter Gigi Ahli Muda (Spesialis	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah dr.	Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	Rumah Sakit Umum Daerah dr.

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Bedah Mulut dan Maksilofasial)	Medis	Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	dan Maksilofasial (Sp-1)		Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah
62	Dokter Ahli Muda (Spesialis Urologi)	Bidang Pelayanan Medis	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	Pendidikan Dokter Spesialis Urologi (Sp-1)	1	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah
63	Arsiparis Mahir	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	D-III Kearsipan / Semua Jurusan Yang Relevan	1	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
64	Pengelola Layanan Operasional	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
65	Pengelola Layanan Operasional	Sub Bagian Program	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
66	Perawat Ahli Madya	Seksi Keperawatan Rawat Inap	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta	S-1 Keperawatan + Profesi Ners	1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta
67	Perawat Penyelia	Seksi Keperawatan	Rumah Sakit Umum	D-III Keperawatan	1	Rumah Sakit

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rawat Inap	Daerah Dr. Rehatta			Umum Daerah Dr. Rehatta
68	Bidan Mahir	Seksi Keperawatan Rawat Inap	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta	D-III Kebidanan	1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta
69	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bidang Promosi Dan Informasi	Badan Penghubung	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Badan Penghubung Daerah
70	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	S-1/D-IV Kearsipan, Ilmu Perpustakaan	1	Badan Penghubung Daerah
71	Pranata Komputer Terampil	Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	D-III / S-1 Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi (TI)	1	Badan Penghubung Daerah
72	Pranata Komputer Terampil	Sub Bagian Tata Usaha	Balai Industri Logam dan Kayu	D-III Teknik Informatika	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
73	Penelaah Teknis Kebijakan	Balai Industri Logam dan Kayu	Balai Industri Logam dan Kayu	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
74	Arsiparis	Sub Bagian Umum dan	Dinas Perindustrian	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelia	Kepegawaian	dan Perdagangan			Perindustrian dan Perdagangan
75	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Dinas Sosial	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Sosial
76	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Program	Dinas Sosial	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Sosial
77	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Pelayanan Sosial Gondang	Panti Pelayanan Sosial Raharjo Sragen	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Sosial
78	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	Sekretariat Daerah	S-1/D-IV Semua Jurusan	2	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama
79	Pranata Komputer Terampil	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	D-III Bidang Teknologi Informasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama
80	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-	Biro Hukum	Sekretariat Daerah	S-1 Hukum	1	Biro Hukum

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	undangan					
81	Dokumentalis Hukum	Biro Hukum	Sekretariat Daerah	D-III Semua Jurusan	1	Biro Hukum
82	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Biro Hukum	D-III Semua Jurusan	1	Biro Hukum
83	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Sekretariat Daerah	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
84	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	D-III Kearsipan	1	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
85	Pranata Komputer Terampil	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	D-III Teknik Informatika/Illmu Komputer/Sistem Informasi	1	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
86	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Tatausaha Biro	Biro Umum	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Biro Umum
87	Pengelola	Sub Bagian Protokol	Biro Umum	D-III Semua Jurusan	1	Biro Umum

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Keprotokolan					
88	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Sarana Dan Prasarana	Biro Umum	D-III Semua Jurusan	1	Biro Umum
89	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	S-1 Semua Jurusan	1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
90	Pengolah Data dan Informasi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	D-III Semua Jurusan	1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
91	Pengelola Layanan Operasional	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	D-III Semua Jurusan	1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
92	Pengelola Barang/Jasa Ahli Muda	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Biro Pengadaan Barang/Jasa
93	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	S-1/D-IV + S-2 Semua Jurusan	1	Biro Perekonomian
94	Pranata Komputer Terampil	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian	D-III/S-1 Teknik Informatika/ Komputer	1	Biro Perekonomian
95	Penelaah Teknis	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Biro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan	Usaha				Perekonomian
96	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan	Sekretariat Daerah	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan
97	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan	Sekretariat Daerah	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan
98	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan	Sekretariat Daerah	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan
99	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Fasilitas Kerjasama dan Ekonomi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	S-1 Semua Jurusan	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
			Provinsi Jawa Tengah			Sipil
100	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	D-III dan/atau S-1 Semua Jurusan (Bidang Ekonomi)	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
101	Dokter Ahli Madya (Spesialis Gizi Klinik)	Bidang Pelayanan Medis	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik (Sp-1)	1	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
102	Dokter Ahli Madya (Spesialis Anak Sub Spesialis Kardiologi Anak)	Bidang Pelayanan Medis	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	Pendidikan Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak Peminatan Kardiologi (Sp-2)	1	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
103	Dokter Ahli Madya (Spesialis	Seksi Penunjang	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.	Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Sp-1)	1	Rumah Sakit Umum Daerah

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik)	Terapi	Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah			Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
104	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bagian Keuangan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	D-IV Ilmu Pemerintahan Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
105	Pengolah Data dan Informasi	Subbag Tata Usaha	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	D-III Manajemen/Akuntansi/Ekonomi, S-1 Manajemen/Akuntansi/Ekonomi	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
106	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Energi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	S-1 / D-IV Bidang Energi / Bidang Elektro / Teknik Elektronika / Teknik Tenaga Elektrik / Teknik Pertambangan / Teknik Geologi / Teknik Kimia / Teknik Fisika / Teknik Perminyakan	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
107	Perawat Mahir	Seksi Keperawatan	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam	D-III/S-1 keperawatan	1	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam
108	Penelaah Teknis Kebijakan	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam	S-1 Akuntansi	1	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam
109	Pranata Komputer Mahir	Sub Bag Keuangan dan Perencanaan	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo	S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi	1	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
			Roestam			Roestam
110	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Kelembagaan	Dinas Pertanian Dan Peternakan	S-1/D-IV Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian, Peternakan	1	Dinas Pertanian Dan Peternakan
111	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat	Dinas Pertanian Dan Peternakan	S-1/D-IV Akuntansi, Ekonomi Manajemen	1	Dinas Pertanian Dan Peternakan
112	Pranata Komputer Terampil	Balai Pelindungan Tanaman	Dinas Pertanian Dan Peternakan	S-1/D-IV Teknik Informatika, Sistem Informasi	1	Dinas Pertanian Dan Peternakan
113	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Inspektorat	S-1 Semua Jurusan	1	Inspektorat
114	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	Inspektorat	S-1 Semua Jurusan	1	Inspektorat
115	Perencana Ahli Pertama	Sub Bagian Perencanaan	Inspektorat	S-1 Manajemen	1	Inspektorat
116	Dokter Ahli Madya (Umum)	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	S-1 Kedokteran	1	Dinas Kesehatan
117	Dokter Ahli Muda (Umum)	Balai Kesehatan Masyarakat wilayah	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah	S-1 Kedokteran	1	Dinas Kesehatan

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pati	Pati			
118	Teknisi Elektromedis Mahir	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A	D-III Elektromedis, Teknik Elektromedis	1	Dinas Kesehatan
119	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	D-III Kearsipan atau bidang yang relevan	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
120	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	S-1/D-IV Ilmu Komunikasi, Manajemen, Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
121	Penata Layanan Operasional	Sub Bagian Keuangan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	S-1/D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
122	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	D-III Kearsipan atau bidang lain yang relevan	1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
123	Penata Layanan Operasional	Sub Bagian Program	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	S-1 Semua Jurusan	1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
						Ekonomi Kreatif
124	Penata Layanan Operasional	Sub Bagian Keuangan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	S-1 Semua Jurusan	1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
125	Fisioterapis Terampil	Bidang Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan	D-III Fisioterapi	1	Dinas Pendidikan
126	Pranata Komputer Terampil	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan	D-III Sistem Informasi, Komputer, Teknologi Informasi, Teknik Informatika, Manajemen Informatika	1	Dinas Pendidikan
127	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan	S-1 Sosial, Komunikasi, Hukum	1	Dinas Pendidikan
128	Arsiparis Mahir	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	D-III Kearsipan atau ilmu lain yang relevan sesuai ketentuan ANRI	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
129	Pengolah Data dan Informasi	Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	D-III Semua Jurusan	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
130	Penelaah Teknis	Seksi Rehabilitasi dan	Cabang Dinas	S-1 Semua Jurusan	1	Dinas Lingkungan

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan	Konservasi Sumber Daya Alam	Kehutanan Wilayah XI			Hidup dan Kehutanan
131	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	S-1 Informatika, S-1 Teknik Informatika	1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
132	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Tata Usaha	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	D-III Semua Jurusan	1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
133	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Tata Usaha	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	D-III Semua Jurusan	1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
134	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	S-1 / D-IV Semua Jurusan	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
135	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Keuangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	D-III Semua Jurusan	1	Dinas Tenaga Kerja dan

NO	JABATAN	UNIT ORGANISASI PENEMPATAN	UNIT ORGANISASI INDUK PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN DIPERSYARATKAN	JUMLAH KEBUTUHAN (ORANG/PNS)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
						Transmigrasi
136	Pengolah Data dan Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	D-III Semua Jurusan	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				TOTAL	140 Orang	

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001



**KETENTUAN PAPARAN PADA TAHAP *TALENT GROWTH INTERVIEW***

- A. Ketentuan Umum :
- 1. Peserta yang melakukan paparan pada tahap *talent growth interview* merupakan peserta yang dinyatakan lulus pada tahap CAT Potensi;
  - 2. Paparan disusun dalam maksimal 5 (Lima) Slide;
  - 3. Durasi Penyampaian Paparan maksimal 10 Menit;
  - 4. Paparan sesuai dengan struktur wajib pada huruf B di bawah ini;
  - 5. Setelah peserta melaksanakan paparan, akan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh pewawancara dari OPD tujuan;
- B. Struktur Wajib Paparan :
- Paparan sekurang-kurangnya memuat struktur sebagai berikut :
- 1. Profil Singkat Peserta dan Alasan Mutasi  
Memuat identitas singkat, jabatan dan instansi asal, kompetensi utama, serta alasan strategis pengajuan mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - 2. Gagasan Strategis yang Relevan dengan Perangkat Daerah tujuan dan/atau jabatan yang dilamar.
  - 3. Peran Pribadi dan komitmen  
Menjelaskan peran strategis peserta, pola kerja, kemampuan kolaborasi dan kesiapan penempatan, serta rencana pengembangan diri di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

FOTO

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap (Kapital dengan gelar)

:

2. Tempat/Tanggal Lahir

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Alamat

:

5. Agama

:

6. Telepon / HP

:

7. Alamat e-mail

:

8. Alamat Kantor

:

9. Status Pernikahan

:

10. N I P

:

11. Jabatan saat ini

:

12. Unit Kerja

:

II. LINGKUNGAN KELUARGA

Susunan Keluarga ( Pasangan dan Anak-anak )

	Nama	L / P	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Pekerjaan
Pasangan					
Anak 1					
Anak 2					
Anak 3					

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

	Nama Sekolah	Jurusan	Tempat	Thn s/d Thn	Keterangan
S3					
S2					
Univ/Inst					
Akademi					
SLTA					

- a. Isilah dengan huruf cetak
- b. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban untuk pertanyaan pilihan

2. Pendidikan Informal ( Kursus atau Pelatihan )

No.	Jenis Kursus / Training	Tempat	Tahun	Keterangan
1.				
2.				
3.				

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Uraikan dengan singkat pekerjaan Anda selama ini (dimulai dari posisi terakhir):

No.	Jabatan	Bln/Thn s/d Bln/Thn	Unit Kerja
1.		-	
2.		-	
3.		-	

V. Kekuatan dan Kelemahan

1. Apakah yang menjadi kekuatan dalam diri Anda ?

2. Apakah yang menjadi kelemahan dalam diri Anda ?

....., Tgl .....

(.....)

- a. Isilah dengan huruf cetak
- b. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban untuk pertanyaan pilihan

FORMAT SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN/ATAU  
TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN



KOP RESMI INSTANSI

SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN  
DAN/ATAU TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir, dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Mutasi Antardaerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

.....2025  
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/  
Pejabat yang mendapat delegasi/  
Rektor/ Pejabat Pimpinan Tinggi  
Pratama yang  
membidangi kepegawaian,

(Tanda Tangan Asli dan Stempel  
Dinas)

Nama  
NIP.

FORMAT SURAT PENGANTAR/REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI



KOP RESMI INSTANSI

Tempat, tanggal surat

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Surat Izin Mengikuti Seleksi Mutasi ke Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
  
Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
  
di  
Semarang

Disampaikan dengan hormat menindaklanjuti surat dari ... (*unit kerja organisasi/Perangkat Daerah Pegawai saat ini pada instansi asal*) pada tanggal...dengan hal..., terkait usulan mutasi atas nama :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

Dengan ini kami memberikan izin kepada PNS tersebut di atas untuk mengikuti Seleksi Mutasi sebagai persyaratan pindah bekerja ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Surat izin ini bukan merupakan persetujuan mutasi PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal.

Pegawai dimaksud tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan dan instansi lamanya, sampai dengan terbit Surat Keputusan Mutasi pada Instansi Baru.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

(JPT yang menangani kepegawaian  
pada instansi asal),

TTE

(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.

- Tembusan :
- 1. PPK Instansi asal;
  - 2. PNS yang bersangkutan.

FORMAT SURAT PERMOHONAN MUTASI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tempat, Tanggal Lahir

Hal : Permohonan mutasi ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

di-  
Semarang  
Dipermaklumkan dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama :  
NIP :  
NIK :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja Saat ini :  
Instansi Saat ini :  
Contact Person : Nomor Handphone/WA :  
E-Mail Pribadi :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi antar intansi dari ...*(nomenklatur saat ini)*...ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendudukan Jabatan Pelaksana/Fungsional....*(nomenklatur Jabatan Pelaksana/Fungsional yang dituju)*... pada Unit Organisasi – Unit Organisasi Induk Penempatan...*(unit organisasi – Unit Organisasi Induk Penempatan yang dituju)*..., dengan alasan sebagai berikut :

- a. ....  
b. ....  
c. ....

Adapun berkas-berkas persyaratan wajib sebagaimana dipersyaratkan sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah nomor S/800.1.3/14/2026 tanggal 6 Januari 2026 hal Pemberitahuan Lowongan Tes Mutasi Masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, telah kami unggah pada platform pendaftaran seleksi mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Surat permohonan ini juga telah diketahui oleh suami/istri/orang tua/wali .....*(pilih salah satu, bagi yang sudah berkeluarga mencantumkan tanda tangan suami/istri, bagi yang belum mencantumkan tanda tangan orang tua/wali)*.... sebagaimana tercantum pada tanda tangan surat dibawah ini.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Mengetahui,  
Suami/Istri/orang tua/wali PNS

TTD Basah/TTE

TTD Basah/TTE

(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.

(Nama lengkap)  
NIK.

FORMAT SURAT PERNYATAAN REKAM JEJAK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

NIK :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja saat ini :

Instansi saat ini :

Nomor Telepon Pribadi :

WhatsApp :

Sehubungan dengan permohonan mutasi antar instansi dari **(nomenklatur instansi saat ini)** ke **Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** untuk menduduki jabatan **(nomenklatur jabatan pelaksana sesuai dengan formasi yang dilamar)**,dengan ini saya **menyatakan secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab secara hukum** bahwa :

1. **Sejak pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat, saya tidak pernah terindikasi dan/atau terbukti secara hukum maupun administratif :**

a. Melakukan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan/atau aset negara;

b. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau **Kode Etik Pegawai Negeri Sipil**;

c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan **norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kepatutan** yang dapat mencederaikan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

d. Melakukan perbuatan yang mencerminkan **pelanggaran integritas, etika jabatan, atau konflik kepentingan**; dan

e. Melakukan penyalahgunaan **narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya**, baik yang diproses secara pidana maupun administratif.
2. **Tidak memiliki permasalahan ataupun kondisi hutang piutang** dengan instansi pemerintah tempat saya bekerja ataupun dengan pihak bank, yang belum terselesaikan dan tertunggak pembayarannya hingga saat ini.
3. Seluruh dokumen yang saya sampaikan dalam rangka permohonan mutasi adalah benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta tidak menggunakan dokumen palsu, dimodifikasi, atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. **Saya memberikan persetujuan dan bersedia sepenuhnya ditelusuri rekam jejak** selama saya menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan dikonfirmasi ke **PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, serta pihak yang menangani pengawasan, disiplin dan kepegawaian pada instansi asal saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta **mengetahui dan memahami sepenuhnya akibat hukum dari pernyataan ini**.

Apabila di kemudian hari saya terindikasi dan terbukti memberikan pernyataan yang tidak sesuai, menutupi informasi yang krusial, berbohong, ataupun memasukkan informasi yang berkaitan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia **mempertanggungjawabkan secara perdata di Pengadilan dan dibatalkan dari proses mutasi ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**, ataupun **diajukan mutasi keluar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui

(Pimpinan unit kerja Instansi asal

minimal JPT)

TTD Basah

(nama lengkap dan gelar)

(Pangkat)

NIP.

Yang membuat pernyataan

TTD Basah  
di atas materai Rp. 10.000,-

(nama lengkap dan gelar)

(Pangkat)

NIP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN BEBAS HUTANG PIUTANG



KOP RESMI INSTANSI

SURAT PERNYATAAN  
BEBAS HUTANG PIUTANG  
Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol. Ruang	:	
Jabatan	:	Bendahara
Unit Kerja	:	
Instansi	:	

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol. Ruang	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Instansi	:	

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut tidak sedang dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Bendahara unit kerja asal

TTD Basah/TTE

Nama Lengkap dan gelar  
NIP  
Pangkat



FORMAT SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENGIKUTI PROSES MUTASI DAN  
TIDAK MENUNTUT JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
NIK :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja saat ini :  
Instansi saat ini :  
Nomor Telepon Pribadi :  
WhatsApp :

Sehubungan dengan permohonan mutasi antar instansi dari **(nomenklatur instansi asal)** ke **Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** untuk menduduki jabatan **(nomenklatur jabatan sesuai dengan formasi yang dilamar)**, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

1. **Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi mutasi** yang dilaksanakan secara daring dan/atau luring sesuai dengan jadwal dan tata cara yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. **Bersedia menanggung segala biaya** yang timbul selama mengikuti seluruh tahapan seleksi mutasi, mulai dari pemberkasan, pendaftaran, hingga penempatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. **Bersedia mengimplementasikan substansi paparan** yang disampaikan pada tahap *talent growth interview*.
4. **Bersedia dilakukan evaluasi kinerja secara berkala** setelah penempatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan ketuntasan pelaksanaan target dan solusi, evaluasi *review 360* derajat, serta capaian kinerja lainnya sesuai dengan arahan Atasan Langsung.
5. **Bersedia dialihkan ke jabatan dan/atau unit kerja lainnya** apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja dinyatakan belum memenuhi ekspektasi pimpinan dan/atau belum memberikan kontribusi optimal bagi Perangkat Daerah penempatan.
6. Bersedia ditempatkan pada formasi jabatan dan unit organisasi yang dilamar pada saat seleksi mutasi masuk.
7. Bersedia diangkat kembali kedalam jabatan fungsional sesuai jabatan yang dilamar **.....(KHUSUS BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL/HAPUS POINT JIKA PELAMAR MERUPAKAN JABATAN PELAKSANA)**.... setelah mutasi dan penempatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. **Bersedia tidak akan menuntut** kenaikan jabatan struktural dan/atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tugas belajar, izin belajar, dan/atau cuti di luar tanggungan negara atas permintaan sendiri sekurang-kurangnya selama **2 (dua) tahun** sejak mutasi dan penempatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. **Bersedia tidak akan mengajukan mutasi keluar** dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mutasi antar OPD sekurang-kurangnya selama **5 (lima) tahun** setelah mutasi dan penempatan pertama kecuali ditentukan lain berdasarkan persetujuan Gubernur, kebutuhan organisasi yang mendesak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Bersedia tidak akan diajukan dan/atau mengajukan perubahan jabatan pelaksana serta kenaikan kelas jabatan pelaksana .....(KHUSUS BAGI JABATAN PELAKSANA/HAPUS POINT JIKA PELAMAR DENGAN JABATAN FUNGSIONAL)**... sekurang-kurangnya selama **2 (dua) tahun** setelah penempatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. **Bersedia tidak menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)** selama **3 (tiga) bulan**, terhitung sejak ditetapkan dan mulai melaksanakan tugas sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya tidak memenuhi atau melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia **mempertanggungjawabkan secara administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, termasuk **pembatalan proses mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**.

Mengetahui  
(Pimpinan unit kerja Instansi asal  
minimal JPT)

TTD Basah

(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.

Yang membuat pernyataan

TTD Basah  
di atas materai Rp. 10.000,-

(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT



KOP RESMI INSTANSI

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor :.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Tidak sedang dan/atau akan diusulkan dalam proses kenaikan pangkat, terhitung sejak mendaftar seleksi mutasi masuk sampai dengan ditetapkan Keputusan mutasi Masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Apabila yang bersangkutan ditemukan/diketahui sedang berproses kenaikan pangkat pada saat proses mutasi berlangsung, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat membatalkan seluruh proses mutasi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mutasi PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(JPT yang menangani kepegawaian  
pada instansi asal),

TTE

(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES KENAIKAN JENJANG  
JABATAN FUNGSIONAL



KOP RESMI INSTANSI

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor :.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Tidak sedang dan/atau akan diusulkan dalam proses Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, terhitung sejak mendaftar seleksi mutasi masuk sampai dengan ditetapkan Keputusan mutasi Masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Apabila yang bersangkutan ditemukan/diketahui sedang berproses kenaikan jenjang Jabatan Fungsional pada saat proses mutasi berlangsung, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat membatalkan seluruh proses mutasi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mutasi PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian.

Tempat, Tanggal Surat  
(JPT yang menangani kepegawaian  
pada instansi asal),

TTE

(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.

FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN INSPEKTORAT



KOP INSTANSI INSPEKTORAT

**SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN**  
**Nomor :.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Untuk keperluan : Persyaratan seleksi mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Maka berdasarkan data dan catatan pada Inspektorat ...(*nomenklatur inspektorat Instansi asal*), bahwa yang bersangkutan dinyatakan **bebas temuan** pengawasan/pemeriksaan eksternal dan internal/APIP dan tidak ada unsur kerugian keuangan Negara/daerah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal Surat  
(JPT yang menangani pengawasan  
(Inspektorat) pada instansi asal),

TTE/TTD Basah

(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IKATAN DINAS



KOP INSTANSI

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk keperluan : Persyaratan seleksi mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data yang ada pada kami benar tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas ke jenjang lebih tinggi dan tidak sedang melaksanakan program re-entry (program pendayagunaan).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, Tanggal Surat

(JPT yang menangani kepegawaian

pada instansi asal),

TTE

(nama lengkap dan gelar)

(Pangkat)

NIP.

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MENGGANGGU KINERJA ORGANISASI  
ATAS PROSES MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PIMPINAN UNIT KERJA ASAL  
MINIMAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN



KOP INSTANSI

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Untuk keperluan : Persyaratan seleksi mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Adalah benar Pegawai Negeri di...(Unit Kerja/OPD asal).... Sehubungan dengan rencana mutasi pegawai atas nama ..... ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai...(nama jabatan yang dituju)...., maka kami selaku ...(pimpinan perangkat daerah/Pimpinan Unit Kerja asal)... menyatakan bersedia untuk melepas yang bersangkutan apabila dinyatakan diterima dan dinyatakan lulus seleksi mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kami juga menyatakan bahwa pelepasan pegawai tersebut tidak akan mengganggu kinerja dan operasional di ...(Unit Kerja/OPD asal), karena telah disiapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Surat Keterangan ini bukan merupakan Surat Persetujuan Mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal, surat ini merupakan administrasi penguat tambahan dari atasan unit kerja asal bagi proses mutasi PNS yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dalam proses pengurusan pindah yang bersangkutan.

Tempat, Tanggal Surat  
(pimpinan unit kerja asal dengan jabatan JPT (boleh didelegasikan/dimandatkan penandatanganan ke pejabat dibawahnya minimal pejabat administrator/eselon III a.n pejabat eselon II)),

TTE

(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN USUL PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL



KOP INSTANSI OPD TUJUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan **bersedia dan menyetujui** untuk mengusulkan **pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional** bagi Pegawai Negeri Sipil berikut :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah...

Sehubungan dengan **pengajuan mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**, yang bersangkutan **dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi**, serta memiliki **kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang relevan** dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dimaksud pada unit kerja kami serta telah secara nyata dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi mutasi masuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Apabila yang bersangkutan telah ditetapkan keputusan mutasinya sebagai pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami **bersedia mengusulkan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** serta bertanggung jawab atas pembinaan dan penugasan yang bersangkutan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, Tanggal Surat  
(Kepala OPD (JPT) Tujuan di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

TTE  
  
(nama lengkap dan gelar)  
(Pangkat)  
NIP.